

## Membangun Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah

Teguh Purnomo<sup>1\*</sup>, Mochammad Ardi Setyawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

<sup>2</sup>Universitas Tulungagung

Email : [purnomo\\_teguh@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:purnomo_teguh@untag-banyuwangi.ac.id), [ardiraffi8830@gmail.com](mailto:ardiraffi8830@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received : 28 - 04, 2025

Revised : 07 - 05, 2025

Accepted : 28 - 08, 2025

#### Keywords:

Akuntabilitas vertikal dan horizontal;  
Birokrasi;  
Pemerintahan,  
Daerah.

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji bagaimana akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat dibangun dalam birokrasi pemerintahan daerah untuk memperkuat prinsip good governance dan kepercayaan publik. Akuntabilitas publik merupakan landasan penting dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap efektivitas kinerja birokrasi daerah. Literatur menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban pejabat dan lembaga kepada pemangku kepentingan eksternal seperti warga negara melalui mekanisme demokrasi dan partisipasi publik, berperan signifikan dalam menahan penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan legitimasi pemerintahan (Lührmann, Marquardt, & Mechkova, 2020). Sementara itu, akuntabilitas horizontal mencakup hubungan pertanggungjawaban antar lembaga pemerintah yang setara—misalnya legislatif, eksekutif, dan lembaga pengawas—untuk memastikan fungsi checks and balances dalam sistem birokrasi modern (Schillemans, 2008). Studi empiris nasional juga menegaskan pentingnya kedua bentuk akuntabilitas ini dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa dan daerah (Hamzah & Asyâ'ari, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, dan survei persepsi publik untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan institusional yang memfasilitasi pembangunan akuntabilitas strategis di birokrasi daerah. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui desain mekanisme akuntabilitas yang adaptif, integratif, dan partisipatif.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



#### \*Corresponding Author:

**Teguh Purnomo**

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
[purnomo\\_teguh@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:purnomo_teguh@untag-banyuwangi.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar utama dalam good governance yang menentukan legitimasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab kepada

otoritas yang lebih tinggi tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan utama. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu hubungan sosial di mana aktor pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum atau pihak yang berwenang, yang kemudian dapat mengevaluasi, menilai, dan memberikan konsekuensi atas tindakan tersebut (Schedler, Diamond, & Plattner, 1999) sebagaimana dibahas dalam literatur akademik internasional tentang akuntabilitas pemerintahan).

Dalam kajian public administration, akuntabilitas tradisional umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal mencerminkan hubungan antara pejabat publik atau lembaga pemerintah dengan pihak yang lebih tinggi atau dengan warga negara melalui mekanisme formal seperti pemilu, sistem hierarki birokrasi, dan proses pertanggungjawaban yang terstruktur (Mechkova, Lührmann, & Lindberg, 2019). Sedangkan akuntabilitas horizontal mengacu pada mekanisme kontrol antar lembaga selevel dalam sistem pemerintahan—misalnya fungsi legislatif, yudikatif, lembaga pengawas independen, dan mekanisme checks and balances yang saling menjaga kinerja dan perilaku aparatur negara (Schillemans, 2008).

Kedua bentuk akuntabilitas ini saling melengkapi dan diperlukan dalam birokrasi pemerintahan daerah. Akuntabilitas vertikal menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang disusun dan diimplementasikan oleh pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas dan otoritas yang lebih tinggi. Sementara itu, akuntabilitas horizontal menyokong prinsip checks and balances, yang penting untuk mencegah dominasi satu lembaga atau fungsi terhadap yang lain serta memastikan transparansi, akurasi pelaporan, dan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum administrasi publik.

Dalam praktik pemerintahan daerah, tantangan akuntabilitas seringkali muncul dari lemahnya kapasitas institusional, minimnya partisipasi publik, serta kurangnya integrasi antara mekanisme akuntabilitas formal dan informal. Penelitian sebelumnya menggarisbawahi bahwa dominasi akuntabilitas vertikal tanpa penguatan akuntabilitas horizontal dapat menimbulkan defisit kontrol internal dan memunculkan celah dalam integritas birokrasi (administrative accountability). Oleh karena itu, desain mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam pemerintahan daerah harus mempertimbangkan sinergi kedua dimensi tersebut, serta bagaimana mereka saling berinteraksi untuk menghasilkan birokrasi yang responsif, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat dibangun secara simultan dalam birokrasi pemerintahan daerah Indonesia, khususnya melalui pemetaan faktor struktural, institusional, serta budaya organisasi yang mempengaruhi praktik pertanggungjawaban. Pendekatan ini menjadi penting karena masih banyak fenomena di tingkat daerah di mana mekanisme formal akuntabilitas belum sepenuhnya diinternalisasi, sehingga perlu dicari strategi implementatif yang responsif terhadap konteks lokal serta prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran teoretis dan empiris yang komprehensif tentang pembangunan akuntabilitas di birokrasi pemerintahan daerah dengan memperhatikan konteks administratif, politik, dan sosial budaya Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal

Akuntabilitas merupakan konsep sentral dalam kajian administrasi publik dan good governance, yang menggambarkan hubungan pertanggungjawaban antara aktor publik dan pihak yang berwenang menilai serta memberi konsekuensi atas tindakan mereka. Dalam literatur manajemen publik, akuntabilitas didefinisikan sebagai hubungan di mana seorang aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan keputusan dan tindakannya kepada forum atau pihak lain yang memiliki hak menilai dan memberi sanksi (Schedler, Diamond, & Plattner, 1999) sebagaimana diuraikan dalam literatur modern tentang akuntabilitas publik).

### 2.2 Konsep Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merujuk pada hubungan pertanggungjawaban di antara aktor yang tidak setara secara hierarkis, seperti antara pejabat publik dan pemangku kepentingan yang lebih tinggi atau warga negara. Dalam konteks birokrasi, akuntabilitas vertikal meliputi mekanisme formal seperti pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif, serta kontrol melalui pemilu dan mekanisme demokratis lainnya. Hal ini mencerminkan model tradisional principal-agent di mana pejabat publik bertanggungjawab secara struktural atas perilaku dan kinerja mereka kepada lembaga yang lebih tinggi atau kepada masyarakat luas sebagai prinsipal.

Mechkova, Lührmann, dan Lindberg (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas vertikal mencerminkan hubungan antara lembaga pemerintahan dan aktor eksternal yang memiliki wewenang untuk menuntut penjelasan dan konsekuensi atas tindakan pemerintah. Mereka menekankan pentingnya pemahaman yang tepat tentang siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, untuk apa, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban tersebut dilakukan.

### 2.3 Konsep Akuntabilitas Horizontal

Sementara itu, akuntabilitas horizontal merujuk pada hubungan pertanggungjawaban antara aktor pada tingkat yang sama atau berdasarkan struktur pemerintahan selevel, seperti antar-lembaga pemerintahan, komisi pengawas independen, lembaga legislatif, dan yudikatif. Akuntabilitas horizontal memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah saling mengawasi untuk melindungi integritas sistem birokrasi dan menekan penyalahgunaan wewenang. Schillemans (2008) dalam kajiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal terjadi ketika lembaga pemerintahan harus menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada lembaga lain yang relatif independen, bukan kepada hirarki vertikal yang superior. Dalam konteks ini, horizontal accountability memperluas dimensi akuntabilitas di luar hubungan hierarkis, memungkinkan lembaga seperti komisi audit, ombudsman, dan badan legislatif untuk menuntut pertanggungjawaban dari lembaga eksekutif, sehingga mewujudkan checks and balances dalam tata kelola pemerintahan.

### 2.4 Interaksi antara Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal

Literatur modern juga menyoroti bahwa akuntabilitas vertikal dan horizontal tidak berdiri sendiri, tetapi sering berinteraksi dalam sistem administrasi publik yang kompleks. Reddick, Demir, dan Perlman (2020) menggambarkan tiga bentuk akuntabilitas—vertikal, horizontal, serta hybrid—dan menunjukkan bagaimana kedua bentuk utama tersebut bisa bekerja bersama untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban yang lebih komprehensif dalam pemerintahan lokal. Studi mereka menemukan bahwa di pemerintahan kota di Amerika Serikat, unsur vertikal dan horizontal sama-sama hadir dan saling melengkapi dalam praktik pertanggungjawaban birokrasi.

Lebih jauh lagi, kajian konseptual tentang akuntabilitas memperlihatkan bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan dan kontrol melalui mekanisme formal, tetapi juga menggabungkan interaksi antar aktor yang saling memantau dan menilai tindakan satu sama lain (Schillemans & Busuioic, 2015; Brandsma & Schillemans, 2013 seperti dibahas dalam literatur proses akuntabilitas). Pendekatan semacam ini menekankan pentingnya informasi, diskusi, dan konsekuensi sebagai elemen kunci dalam proses akuntabilitas yang efektif, termasuk dalam pengawasan horizontal.

### 2.5 Relevansi dalam Pemerintahan Daerah

Dalam konteks pemerintahan daerah, kedua bentuk akuntabilitas ini sangat penting untuk menjamin transparansi, legitimasi, dan partisipasi publik. Akuntabilitas vertikal membantu memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat, sementara akuntabilitas horizontal memperkuat peran lembaga-legislatif dan pengawas dalam mencegah penyimpangan administratif serta memperkuat integritas birokrasi.

Birokrasi merupakan fenomena sentral dalam kajian administrasi publik yang memengaruhi efektivitas, responsivitas, dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Secara klasik, birokrasi dipahami sebagai bentuk organisasi yang rasional, legal-otoritatif, dan terstruktur untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang kompleks secara efisien, efektif, serta akuntabel. Kajian awal oleh Max Weber menegaskan bahwa birokrasi sebagai ideal type didasarkan pada prinsip-prinsip formal seperti pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang, aturan tertulis, serta seleksi dan karir berbasis kompetensi teknis—segala hal yang dianggap esensial untuk menjamin keadilan prosedural dan kontinuitas tugas administratif dalam organisasi publik (Weber, sebagaimana dikaji dalam literatur rational-legal authority). Konsep ini berakar pada legitimasi hukum formal dan telah menjadi fondasi teoritis utama dalam studi birokrasi modern.

Dalam konteks pemerintahan daerah, birokrasi dirancang untuk menerjemahkan kebijakan publik pusat ke dalam implementasi lokal yang kontekstual. Kondisi ini mengharuskan birokrasi lokal untuk tidak hanya memahami aturan formal tetapi juga dinamika sosial-politik lokal serta tuntutan pelayanan publik yang semakin partisipatif. Literatur terbaru menegaskan bahwa birokrasi pemerintahan lokal tidak dapat dipisahkan dari tradisi administrasi nasional dan karakteristik budaya pemerintahan setempat, termasuk tradisi administratif yang berpengaruh terhadap struktur, perilaku, dan adaptasi birokrasi dalam respon terhadap kompleksitas tugas pemerintahan modern. Misalnya, studi konseptual terbaru oleh Jugl (2025) menyajikan sintesis berbagai tradisi administrasi yang membentuk kerangka birokrasi di berbagai negara, menunjukkan bahwa struktur administratif dan praktik birokrasi lokal sangat bervariasi namun tetap berbagi pola rasionalisasi tertentu.

Kajian empiris di berbagai negara juga menunjukkan bahwa karakter birokrasi secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintahan lokal dalam memberikan layanan publik berkualitas. Penelitian tentang street-level bureaucracy menunjukkan bahwa birokrat yang berinteraksi langsung dengan warga, misalnya petugas layanan publik di tingkat lokal, memiliki peran penting dalam menyeimbangkan aturan formal dengan kebutuhan kontekstual warga, sementara kewenangan diskresioner mereka dapat mendorong adaptasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Literatur ini menunjukkan dinamika baru birokrasi yang tidak semata bersifat ‘kaku’, tetapi juga responsif terhadap tuntutan lokal (Chang, A., & Brewer, G. A., 2022).

Selain dimensi struktur dan kinerja, studi tentang representative bureaucracy juga menggarisbawahi peran diversitas birokrat dalam mencerminkan karakter warga yang dilayani. Penelitian meta-analisis yang komprehensif mengindikasikan bahwa tingkat representativitas birokrasi (mis. dalam hal demografi dan prinsip kesetaraan sosial) berpotensi meningkatkan kinerja organisasi publik dengan menciptakan layanan yang lebih inklusif dan demokratis. Temuan ini relevan dengan pemerintahan daerah karena birokrasi lokal sering kali merupakan wajah langsung negara yang harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam (Ricucci, N. M., Lu, J., & Ding, F., 2021).

Dalam perspektif public governance, birokrasi pemerintahan daerah juga dihadapkan pada tantangan modernisasi dan reformasi administratif. Paradigma baru seperti networked bureaucracy menekankan bahwa birokrasi tidak lagi eksklusif melalui hubungan hierarkis formal, tetapi juga dalam bentuk jaringan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor publik dan non-pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan bersama. Kajian ini memperluas cara pandang tradisional terhadap birokrasi, dengan melihat birokrasi sebagai bagian dari ekosistem tata kelola yang adaptif dan fleksibel terhadap kompleksitas sosial dan teknologi yang terus berkembang.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) untuk menggali secara komprehensif fenomena pembangunan akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam birokrasi pemerintahan daerah. Pendekatan metode campuran dipilih karena mampu menggabungkan kekuatan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap masalah penelitian dibandingkan penggunaan satu metode saja, sesuai dengan prinsip penelitian di ilmu administrasi publik dan pemerintahan (public administration) yang kompleks dan bersifat multidimensional (Hendren, Luo, & Pandey, 2018)

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Tingkat Akuntabilitas Vertikal dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah

Hasil survei kuantitatif menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal dalam birokrasi pemerintahan daerah berada pada kategori menengah-tinggi, dengan skor rata-rata indikator pelaporan administratif, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi publik pada proses pertanggungjawaban relatif tinggi. Hal ini tampak dari persentase responden yang menyatakan bahwa laporan kinerja dan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan daerah tersedia dan dapat diakses publik. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya pelaporan dan transparansi sebagai pilar utama akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dalam sistem pemerintahan yang demokratis (Mechkova, Lührmann, & Lindberg, 2019). Studi tersebut menegaskan bahwa mekanisme kontrol vertikal yang kuat—termasuk akses informasi dan mekanisme pertanggungjawaban administratif—berkorelasi positif dengan persepsi legitimasi pemerintahan di mata publik.

Namun, meskipun skor akuntabilitas vertikal tergolong tinggi, analisis inferensial menunjukkan variasi signifikan antar unit kerja di pemerintahan daerah. Unit yang memiliki mekanisme pelaporan internal yang lebih terstruktur—seperti inspektorat daerah—cenderung memiliki indikator akuntabilitas vertikal yang lebih kuat dibanding unit yang fokus pada layanan publik langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur formal dan rutinitas pelaporan berpengaruh pada praktik akuntabilitas vertikal, serupa dengan temuan Reddick, Demir, dan Perlman (2020) yang menemukan bahwa struktur organisasi dan kapasitas administratif berperan dalam memperkuat akuntabilitas formal di pemerintahan lokal.

#### 4.2. Tingkat Akuntabilitas Horizontal dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah

Analisis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan focus group discussion menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal—diukur melalui hubungan antar lembaga (misalnya legislatif, eksekutif, dan lembaga pengawas lokal)—masih menghadapi tantangan implementatif. Walaupun mekanisme checks and balances formal telah diatur dalam regulasi, praktik pengawasan horizontal sering terhambat oleh kurangnya koordinasi dan independensi antar lembaga. Temuan ini konsisten dengan kajian Schillemans (2008), yang menjelaskan bahwa meskipun akuntabilitas horizontal merupakan elemen penting dalam tata kelola birokrasi modern, implementasinya sering terhambat oleh hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan dominasi hierarki internal (hierarchical dominance) dalam organisasi pemerintahan.

Wawancara dengan informan kunci juga mengungkap bahwa lembaga pengawas internal masih berperan lebih sebagai unit auditor ketimbang sebagai mitra independen dalam mendorong akuntabilitas horizontal. Hal ini memperlihatkan adanya institutional gap antara aturan formal akuntabilitas horizontal dan praktik di lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Bovens, Goodin, dan Schillemans (2014) yang menekankan bahwa reputasi akuntabilitas horizontal dalam birokrasi sangat dipengaruhi oleh kapabilitas lembaga pengawas serta budaya organisasi yang mendukung pengawasan seajar (peer accountability).

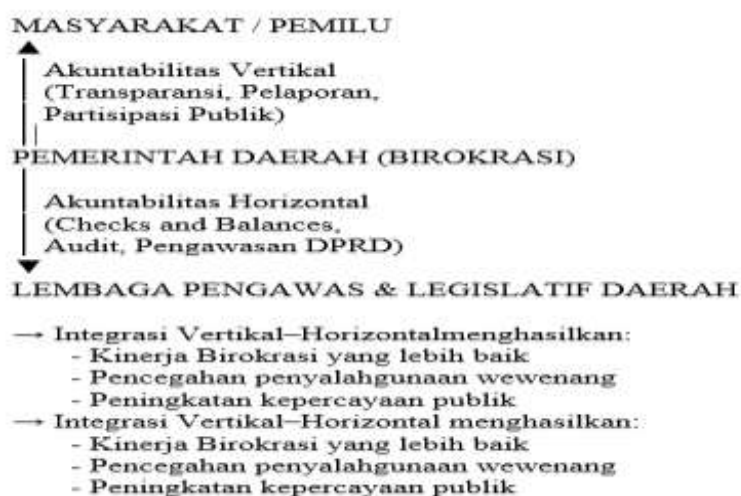
### 4.3. Interaksi antara Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal dan horizontal tidak berjalan secara independen, melainkan saling memengaruhi. Analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan transparansi vertikal berkontribusi signifikan terhadap persepsi stakeholder terhadap efektivitas pengawasan horizontal. Hal ini mendukung argumen teori diagonal accountability, di mana hubungan antara akuntabilitas vertikal dan horizontal menghasilkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap birokrasi publik (Mechkova et al., 2019). Secara praktis, unit kerja yang memiliki mekanisme pelaporan vertikal yang kuat cenderung lebih responsif terhadap masukan dari lembaga legislatif dan pengawas, sehingga memperkuat interaksi antara dua bentuk akuntabilitas.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa sinergi antara akuntabilitas vertikal dan horizontal berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik di tingkat pemerintahan daerah. Unit yang berhasil mengintegrasikan kedua mekanisme akuntabilitas melaporkan lebih sedikit insiden kesalahan prosedural dan mendapatkan skor kepuasan layanan yang lebih tinggi dari masyarakat. Hasil ini konsisten dengan studi tentang hybrid accountability yang menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme akuntabilitas yang saling melengkapi cenderung menghasilkan kinerja administratif yang lebih baik dibanding mekanisme yang berdiri sendiri (Reddick et al., 2020).

### 4.4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang dinamika akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan daerah dengan menegaskan pentingnya integrasi antara akuntabilitas vertikal dan horizontal. Temuan empiris menunjukkan bahwa struktur pelaporan administratif (vertikal) dan mekanisme kontrol lembaga seajar (horizontal) harus didesain secara sadar dan terpadu agar saling memperkuat, bukan berjalan terpisah. Hal ini menguatkan pandangan bahwa akuntabilitas publik merupakan fenomena multidimensional accountability yang lebih efektif bila dipahami sebagai interaksi antara berbagai bentuk kontrol sosial dan kelembagaan (Bovens et al., 2014).



**Gambar Diagram Konseptual Integrasi Akuntabilitas Vertikal–Horizontal**

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan akuntabilitas vertikal dan horizontal merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal—yang diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, transparansi informasi, dan partisipasi publik—telah berperan signifikan dalam memperkuat legitimasi birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan kajian Mechkova, Lührmann, dan Lindberg (2019) yang menegaskan bahwa mekanisme kontrol vertikal yang kuat menjadi instrumen penting dalam membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas horizontal—melalui mekanisme checks and balances antar lembaga pemerintahan daerah—masih menghadapi tantangan implementatif, khususnya terkait independensi lembaga pengawas dan efektivitas koordinasi antar institusi. Kondisi ini mengindikasikan

adanya kesenjangan antara kerangka regulatif dan praktik aktual pengawasan sejajar, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Schillemans (2008) yang menyoroti dominasi hierarki dan lemahnya posisi lembaga pengawas sebagai hambatan utama akuntabilitas horizontal dalam birokrasi public

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas vertikal dan horizontal tidak dapat dipahami sebagai dua mekanisme yang berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai sistem yang saling melengkapi. Integrasi kedua bentuk akuntabilitas tersebut terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Temuan ini mendukung perspektif multidimensional accountability yang menyatakan bahwa efektivitas pertanggungjawaban publik akan meningkat ketika berbagai mekanisme akuntabilitas bekerja secara sinergis (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014). Dengan demikian, penguatan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan daerah menuntut pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi struktural, institusional, dan partisipatif.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas vertikal melalui peningkatan keterbukaan data publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kinerja, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan evaluasi kebijakan. Upaya ini sejalan dengan literatur internasional yang menekankan bahwa transparansi dan akses informasi merupakan fondasi utama bagi pengawasan publik yang efektif (Reddick, Demir, & Perlman, 2020).

Kedua, penguatan akuntabilitas horizontal perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas dan independensi lembaga pengawas daerah, seperti inspektorat dan DPRD, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional. Reformasi kelembagaan ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme checks and balances tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berfungsi secara substantif dalam mencegah penyimpangan birokrasi, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian tata kelola publik kontemporer (Schillemans, 2008).

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan komparatif antar daerah atau menggunakan data longitudinal guna menangkap dinamika perubahan akuntabilitas birokrasi dari waktu ke waktu. Selain itu, eksplorasi dimensi diagonal accountability—yang melibatkan peran masyarakat sipil dan media—dapat menjadi agenda penelitian lanjutan untuk memperkaya pemahaman tentang tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berkelanjutan (Mechkova et al., 2019).

## 6. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pendekatan integratif terhadap akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam birokrasi pemerintahan daerah, yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah dalam literatur administrasi publik. Studi-studi terdahulu umumnya memfokuskan analisis pada salah satu dimensi akuntabilitas, baik vertikal—melalui mekanisme pemilu, pelaporan, dan kontrol hierarkis—maupun horizontal melalui fungsi checks and balances antar lembaga negara (Schillemans, 2008). Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan menempatkan kedua bentuk akuntabilitas sebagai sistem yang saling berinteraksi dan saling memperkuat dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0013>
- Brandsma, G. J., & Schillemans, T. (2013). *Process-based accountability research*. Public Administration.
- Chang, A., & Brewer, G. A. (2022). Street-Level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2065517>
- Hamzah, A. K., & Asyâ'ari, M. A. (2023). Akuntabilitas vertikal dan horizontal pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. *Equity: Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.46821/equity.v2i2.232>
- Hendren, K., Luo, Q. E., & Pandey, S. K. (2018). The state of mixed methods research in public administration and public policy. *Public Administration Review*, 78(6), 904–916. <https://doi.org/10.1111/puar.12981>
- Jugl, M. (2025). Patterns of bureaucracy: Conceptualizing administrative traditions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(3), 277–291. <https://doi.org/10.1093/jopart/nuaf012>
- Kanon, M. (2024). The networked bureaucracy: reinventing formalization in the context of collaborative governance. *Public Management Review*, 26(10), 2921–294. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2298230>

- Lührmann, A., Marquardt, K. L., & Mechkova, V. (2020). Constraining governments: New indices of vertical, horizontal, and diagonal accountability. *American Political Science Review*, 114(3), 811–820. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>
- Mechkova, V., Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). Constraining governments: New indices of vertical, horizontal, and diagonal accountability. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>
- Reddick, C. G., Demir, T., & Perlman, B. (2020). Horizontal, vertical, and hybrid: An empirical look at the forms of accountability. *Administration & Society*. <https://doi.org/10.1177/0095399720912553>
- Riccucci, N. M., Lu, J., & Ding, F., (2021). How bureaucratic representation affects public organizational performance: A meta-analysis. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.13361>
- Schedler, A. (1999). *Conceptualizing Accountability*. In A. Schedler, L. J. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Lynne Rienner Publishers.
- Schillemans, T. (2008). Accountability in the shadow of hierarchy: The horizontal accountability of agencies. *Public Organization Review*, 8, 175–194. <https://doi.org/10.1007/s11115-008-0053-8>
- Schillemans, T & Busuioc, M. (2015). Predicting Public Sector Accountability: From Agency Drift to Forum Drift. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 25, Issue 1, January 2015, Pages 191–215, <https://doi.org/10.1093/jopart/muu024>
- Weber, M. *-legal authority sebagai fondasi teori birokrasi modern*